



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016-2019

Disusun oleh:
ANNIS MULYANI
4417030049

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2021

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016-2019

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
Akuntansi

Disusun oleh:
ANNIS MULYANI

4417030049

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2021

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Annis Mulyani

NIM : 4417030049

Tanggal : 01 Agustus 2021

Tanda tangan :



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Annis Mulyani

NIM : 4417030049

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016-2019.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dosen Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Yusep Friya PS, SE, M.Ak, VRQ, CTA, CAAT, CPIA (.....)

Anggota Penguji : Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak., M.M., M.Ak. (.....)

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di Depok

Tanggal : 31 Agustus 2021

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP 196404151990032002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Annis Mulyani
Nomor Induk Mahasiswa : 4417030049
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/ D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pada Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016-2019”

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak., M.M., M.Ak.

Taufikul Ichsan, S.E., Ak.M.M

NIP. 196901111998022001

NIP. 195907221989031002

Ketua Program Studi

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.

NIP. 197202221999031003

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016-2019**” dengan baik dan tepat pada waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk kewajiban untuk menyelesaikan salah satu syarat kelulusan dan pertanggungjawaban menyelesaikan Pendidikan pada program studi Akuntansi Keuangan Terapan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta.

Ucapan terimakasih disampaikan untuk pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr.sc. H., Zainal Nur Arifin Dipl-Ing. HTL.,M.T selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Sabar Winarni, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Herbirowo Nugroho,S.E.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
4. Dr. Titi Suhartati, S.E.,Ak.,M.M.,M.Ak.selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberi bimbingan dan saran, dalam proses penulisan skripsi.
5. Taufikul Ichsan, S.E., Ak, M.M selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberi bimbingan dan dorongan dalam skripsi.
6. Seluruh dosen pengajar Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
7. Kedua Orangtua yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moril ataupun materiil.
8. Teman-teman seperjuangan kelas AKT 8A, 8B dan 8C atas dukungan dalam masa perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi.
9. BTS yang telah memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan melalui musik dan karya-karyanya.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan dan perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi pembaca. Penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat penulisan yang kurang berkenan.

Depok, 01 Agustus 2021

(Annis Mulyani)





LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annis Mulyani
NIM : 4417030049
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016-2019 ”.

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengella dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok-Kebumen

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

Yang menyatakan

Annis Mulyani

NIM.4417030049

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016-2019

Annis Mulyani

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016-2019. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan perhitungan varians pendapatan dan belanja untuk penyerapan realisasi APBD, perhitungan rasio kemandirian, ketergantungan, derajat desentralisasi fiskal dan efektifitas pendapatan untuk kinerja pendapatan serta rasio pertumbuhan, keserasian belanja dan efisiensi belanja untuk kinerja belanja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif metode studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kalimantan Barat pada (1) Penyerapan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016-2019 dari varians pendapatan dinilai sudah optimal karena realisasinya melebihi target anggaran dengan tingkat presentase 101,31% sedangkan dinilai dari varians belanja penyerapan telah mencapai 94,99% yang artinya telah terjadi pemaksimalan pada belanja daerah tetapi tidak melebihi target anggaran. (2) Kemudian dari kinerja pendapatan dilihat dari rasio kemandirian tahun 2015-2019 dikategorikan sedang. Analisis ketergantungan dikategorikan sangat tinggi. Analisis derajat desentralisasi tahun dikategorikan sedang. Dilihat dari analisis efektifitas PAD dan total pendapatan dikategorikan sangat efektif. (3) Kinerja belanja Kalimantan Barat dilihat dari pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan dengan selisih yang positif, Analisis Keserasian belanja selama empat tahun dikategorikan serasi namun keserasian belanja modal dikategorikan tidak serasi. Analisis efisiensi belanja menunjukkan belanja yang efisien.

Kata Kunci: Penyerapan Realisasi APBD, Kinerja Keuangan, Pendapatan, Belanja.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENTS IN WEST KALIMANTAN PROVINCE FOR FISCAL YEAR 2016-2019

Annis Mulyani

D4 Financial Accounting Study Program

This study is aimed at measuring and analyzing the Financial Performance of Regional Government in West Kalimantan Province for the 2016-2019 Fiscal Year. The financial performance measurement used the calculation of income and expenditure variance for the absorption of Local Government Budget (APBD) realization, the ratio calculation of independence, dependence, degree of fiscal decentralization and effectiveness of income for income performance as well as growth ratios, spending compatibility and spending efficiency for spending performance. This research employed a descriptive quantitative approach with a case study method. The data used in this study was secondary data in the form of report data on the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of West Kalimantan Province. The results of the analysis show that West Kalimantan in (1) Absorption of revenue and expenditure budget realization in 2016-2019 from the income variance is considered optimal because the realization exceeds the budget target with a percentage level of 101.31% while the absorption expenditure variance has reached 94.99% which means that there has been a maximization of regional spending but not exceeding the budget target. (2) The income performance as shown in the independence ratio in 2015-2019 is categorized as medium. Dependency analysis is identified as very high. The analysis of the decentralization degree in the year is categorized as moderate. The effectiveness of Local Own-Source Revenue (PAD) and total income is identified as very effective. (3) West Kalimantan's expenditure performance seen from spending growth reveals a positive difference of growth, the analysis of compatibility expenditure for four years is categorized as compatible but the compatibility of capital expenditures is categorized as incompatible. Expenditure efficiency analysis reveals efficient spending.

Keywords: *Absorption of APBD Realization, Financial Performance, Income, Expenditur*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penyerapan anggaran	7
2.2 Kinerja Keuangan Daerah	7
2.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah	8
2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah	9

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	9
2.6 Sumber Pendapatan Daerah	10
2.7 Sumber Belanja Daerah	12
2.8 Pembiayaan	12
2.9 Analisis Kinerja Keuangan	13
2.9.1 Analisis Varians Pendapatan dan Belanja	13
2.9.2 Analisis Kinerja Pendapatan.....	14
2.9.3 Analisis Kinerja Belanja.....	17
2.10 Penelitian Terdahulu.....	20
2.11 Kerangka Pemikiran	25
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Objek Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber data	26
3.4 Metode Pengumpulan data.....	28
3.5 Metode Analisis data	29
BAB 4 PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat	30
4.1.1 Profil Kalimantan Barat.....	30
4.1.2 Visi dan Misi.....	30
4.1.3 Struktur Organisasi	34
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Penyerapan atau Realisasi	
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah	35
4.2.1 Varians Pendapatan	35



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2.2 Varians Belanja.....	37
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan Kinerja Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat.....	39
4.3.1 Kemandirian Daerah	39
4.3.2 Ketergantungan Daerah.....	41
4.3.3 Derajat Desentralisasi Fiskal	43
4.3.4 Efektivitas Pendapatan	45
4.4 Hasil Penelitian dan Pembahasan Kinerja Belanja Provinsi Kalimantan Barat.....	49
4.4.1 Pertumbuhan Belanja	49
4.4.2 Keserasian Belanja.....	52
4.4.3 Efisiensi Belanja	55
BAB 5 PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tingkat Kemandirian Daerah.....	15
Tabel 2.2 Kriteria Ketergantungan Daerah	16
Tabel 2.3 Kriteria Derajat Desentralisasi.....	16
Tabel 2.4 Kriteria Rasio Efektifitas Pendapatan	17
Tabel 2.5 Kriteria Keserasian Belanja	19
Tabel 2.6 Kriteria Penilaian Efisiensi	19
Tabel Penelitian Terdahulu	20
Tabel Kerangka pemikiran	25
Tabel 4.1 Perhitungan Penyerapan Pendapatab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 sampai 2019	35
Tabel 4.2 Perhitungan Penyerapan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 sampai 2019	37
Tabel 4.3 Perhitungan Kemandirian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 sampai 2019	39
Tabel 4.4 Perhitungan Ketergantungan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 sampai 2019.....	42
Tabel 4.5 Perhitungan Derajat Desentralisasi Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 sampai 2019	44
Tabel 4.6 Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016–2019.....	46
Tabel 4.7 Perhitungan Efektivitas Total Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016–2019.....	48
Tabel 4.8 Perhitungan Pertumbuhan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016–2019	50
Tabel 4.9 Perhitungan Keserasian Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2019.....	52
Tabel 4.10 Perhitungan Keserasian Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2019.....	54
Tabel 4.11 Perhitungan Efisiensi Total Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016–2019	56

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR GAMBAR

Grafik 4.1 Perhitungan Kemandirian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 sampai 2019	40
Grafik 4.2 Perhitungan Ketergantungan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 sampai 2019	42
Grafik 4.3 Perhitungan Derajat Desentralisasi Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 sampai 2019	44
Grafik 4.4 Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016–2019.....	46
Grafik 4.5 Perhitungan Efektivitas Total Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016–2019.....	48
Grafik 4.6 Perhitungan Pertumbuhan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016–2019	50
Grafik 4.7 Perhitungan Keserasian Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2019.....	53
Grafik 4.8 Perhitungan Keserasian Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2019.....	54
Grafik 4.9 Perhitungan Efisiensi Total Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016–2019	56

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sudah semakin meningkat dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Awal dimulainya otonomi daerah dimuat pada UU No. 32 Tahun 2004 hasil revisi mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam UU No. 33 Tahun 2004 (Kementerian Keuangan, 2015). Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi diberi wewenang secara leluasa dan mandiri untuk mengolah seluruh sumber daya yang ada di daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah. Adanya kewenangan pemerintah dalam mengelola potensi mandiri daerahnya mengakibatkan pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja terutama dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyajikan dan memberikan informasi yang relevan selama periode pelaporan. Selain itu juga untuk menunjukkan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan seperti akuntabilitas, transparansi dan evaluasi kinerja (Prmono, 2014). Namun, saat ini laporan keuangan pemerintah masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai PP No 71 Tahun 2010 sebagai acuan dalam kinerja keuangan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan. Padahal transparansi sangat penting bagi masyarakat publik agar masyarakat mengetahui apakah pemerintah sebagai pihak yang mengelola keuangan daerahnya berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Kemampuan pemerintah daerah dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggambarkan kemampuan kerjanya dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan (Halim, 2007). Menurut Kementerian Keuangan (2003) APBD adalah rencana keuangan tahunan yang sudah disetujui oleh DPRD dengan jangka masa satu tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Dalam satu tahun, anggaran harus dapat direalisasi sehingga perencanaan keuangan tersebut



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dapat menjawab permasalahan yang ada di daerah. Apakah rencana program dapat terlaksana, apakah program yang dijalankan efektif dan apakah realisasi pendapatan dan belanja telah efisien. Untuk mengetahui semua itu maka pemerintah harus menyusun laporan realisasi anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran dalam APBD menjadi salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang disusun dan disajikan untuk melihat sejauh mana aktivitas anggaran daerah seperti pendapatan dan belanja. Melalui LRA kinerja keuangan daerah dapat dianalisis dengan indikator yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yaitu dengan menggunakan rasio keuangan terhadap APBD (Halim dan Kusufi, 2012). Laporan realisasi ini memberikan informasi yang bermanfaat dalam menilai kinerja keuangan. Berdasarkan LRA tersebut komponen yang digunakan untuk dianalisis adalah Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Penelitian ini mengambil objek pada Pemprov Kalimantan Barat dimana pengukuran kinerja Provinsi Kalimantan Barat disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengacu pada Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan APBD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalimantan Barat tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang dijadikan standar untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan Pemprov terkait pelaksanaan APBD, dimana Pemprov Kalbar melakukan perubahan anggaran tanpa persetujuan DPRD padahal menurut Martinus (2018) pergeseran anggaran tidak ditetapkan dalam perda perubahan sehingga mengakibatkan Pemprov Kalimantan Barat tahun 2018 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dimana selama enam tahun sebelumnya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Pontianak Post, 2018).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK, tahun 2012 sampai 2013 Kalimantan Barat memperoleh opini WTP DPP dan tahun 2014 sampai 2017 memperoleh WTP bahwa penyusunan Laporan Keuangan telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI. Namun tahun 2018, Kalimantan Barat memperoleh hasil WDP oleh BPK karena perubahan anggaran yang mengakibatkan realisasi belanja transfer melampaui anggaran belanja, sebesar Rp753.482.296.620 dengan realisasi Rp961.407.995.045 sehingga mempengaruhi langsung laporan keuangan (BPK Kalbar dan Klinikakuntansi, 2018).

Selain itu, Berdasarkan catatan Kemendagri pada tahun 2019 total pendapatan Kalimantan Barat sebesar Rp5.939.753.156.803,85 dengan penerimaan terbesar berasal dari pendapatan transfer dibandingkan PAD yang artinya pemerintah masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Namun besarnya pendapatan tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada belanja daerah dimana realisasi penyerapan APBD hanya mencapai 85%. Rendahnya realisasi APBD Kalimantan Barat disebabkan oleh belanja modal yang tidak berjalan karena efisiensi anggaran yaitu Rp 1.040.727.102.824,33 dan terealisasi Rp 871.09.747.356,21 atau sisa lelang dan program yang tidak terlaksana atau gagal lelang. Selain itu korupsi APBD juga mengakibatkan serapan anggaran menjadi rendah (Suarapem.kalbar, 2019).

Dari permasalahan tersebut ternyata juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan barat diketahui pada tahun 2019 mengalami perlambatan yaitu 5,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,06%, rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) karena keterbatasan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan salah satunya pendidikan dan meningkatnya pengangguran dari 4,26% menjadi 4,45% dikarenakan rendahnya penyerapan lapangan pekerjaan yang tersedia (BPS Kalimantan Barat, 2019).

Mengingat peran pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber pendapatan dan belanja daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomidaerahnya. Masyarakat diharapkan dapat menilai sejauh mana keberhasilan kinerja pemerintah daerah dengan membandingkan kinerja keuangan yang direncanakan dengan yang dicapai.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penyusunan LKPD Kalimantan Barat, penyusunan tidak sesuai dengan aturan Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakibatkan pemprov memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat opini WDP terjadi terkait pelaksanaan APBD, dimana Pemprov Kalimantan Barat melakukan perubahan anggaran tanpa persetujuan DPRD yang mengakibatkan realisasi belanja melampaui anggaran belanja. Kemudian, besarnya anggaran pendapatan pemprov Kalimantan Barat juga tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada belanja modal daerah dimana masih kurangnya daya serap anggaran belanja. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh belanja modal yang tidak berjalan karena adanya efisiensi anggaran atau sisa lelang serta program yang tidak terlaksana atau gagal lelang pada akhir tahun. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pemprov dalam mewujudkan percepatan pembangunan dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Seperti rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) karena keterbatasan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan, kesehatan dan pendidikan serta meningkatnya pengangguran dikarenakan rendahnya lapangan kerja yang tersedia untuk menunjang aktivitas perekonomian.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana penyerapan anggaran pendapatan dan belanja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ?
- 2) Bagaimana kinerja pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat jika ditinjau dari Kemandirian daerah, Ketergantungan, Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Efektivitas Pendapatan?
- 3) Bagaimana kinerja belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat jika ditinjau dari Analisis Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, dan Efisiensi Belanja?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis penyerapan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 2) Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat jika ditinjau dari Kemandirian daerah, Ketergantungan, Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Efektivitas Pendapatan.
- 3) Untuk menganalisis dan mengukur menganalisis kinerja pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat jika ditinjau dari Analisis Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, dan Efisiensi Belanja

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di bidang akuntansi pemerintahan dan dapat digunakan sebagai referensi bahan kepustakaan dalam perluasan penelitian yang sejenis. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan sumber referensi yang dapat memberikan informasi untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai analisis kinerja keuangan pada pendapatan dan belanja daerah.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan kebijaksanaan yang akan diambil dalam menentukan anggaran pada tahun yang akan datang dan mampu untuk menganalisis kelayakan suatu penyusunan anggaran yang telah ditetapkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1 : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini menyajikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Pembahasan pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang menjadi landasan penelitian mengenai kinerja keuangan daerah Pemprov Kalimantan Barat.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Bab 3 : Metodologi Penelitian

Pembahasan pada bab ini menjabarkan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Meliputi informasi tentang bagaimana kinerja keuangan daerah.

Bab 4 : Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Provinsi Kalimantan Barat, hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2019 untuk menjawab bagaimana kinerja keuangan.

Bab 5 : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban atas permasalahan dan tindakan lanjut bagaimana kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Barat.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Penyerapan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2019 di tinjau dari varians pendapatan dinilai sudah optimal karena realisasinya melebihi target anggaran dengan tingkat presentase 101,31% sedangkan dinilai dari varians belanja penyerapan telah mencapai 94,99% yang artinya telah terjadi pemaksimalan pada belanja daerah tetapi tidak melebihi target anggaran.
2. Hasil analisis Kemandirian Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 dikategorikan tinggi dan tahun 2017 sampai 2019 dikategorikan sedang. Presentase 68,16% menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat pada dana perimbangan meningkat dan masih mendominasi. Selanjutnya melalui analisis Ketergantungan daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 dikategorikan tinggi, tahun 2017 sampai 2019 dikategorikan sangat tinggi dengan rasio 56,91%. Tingginya ketergantungan daerah dipengaruhi oleh besarnya kontribusi DAU dan DAK. Dari analisis derajat desentralisasi Kalimantan Barat selama empat tahun dikategorikan sedang dimana Kalimantan Barat mampu meningkatkan PAD dengan meningkatkan pada pajak daerah namun belum mampu menopang pendapatan daerah karena masih berpaku pada bantuan pemerintah. Pengelolaan PAD melalui analisis efektifitas tahun 2016 dikategorikan efektif, tahun 2017 sampai 2019 dikategorikan sangat efektif dengan rasio rata-rata sebesar 108,34% sedangkan pengelolaan pendapatan tahun 2016 dikategorikan efektif, tahun 2017 sampai 2019 dikategorikan sangat efektif. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kemampuan PAD dalam pengoptimalan potensi sumber daerah dan total pendapatan selama empat tahun melalui pendapatan transefer pusat dalam mencapai target anggaran.
3. Kinerja belanja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 sampai 2019 melalui analisis Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan belanja yang positif. Analisis

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Keserasian belanja selama empat tahun dikategorikan serasi dengan presentase 75,27% dan lebih besar dialokasikan untuk belanja operasional dengan belanja terbesar adalah belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan. Namun keserasian belanja modal dikategorikan tidak serasi dengan presentase 15,84%. Hal ini dikarenakan belum ada standar yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal belum terpenuhi. Sedangkan pada analisis efisiensi belanja menunjukkan belanja yang efisien selama empat tahun terakhir sebesar 94,99% artinya kinerja pemerintah Kalimantan Barat pada tahun 2016-2019 telah melakukan efisiensi belanja atau tidak terjadi pemborosan anggaran dalam penggunaan anggaran.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Berdasarkan perhitungan efektifitas pendapatan, Pemerintah Kalimantan Barat diharapkan dapat mempertahankan efektifitas PAD dari sektor pajak sebagai penerimaan PAD terbesar dan meningkatkan pendapatan sektor lainnya yang berpotensi menambah PAD, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang.
 - b. Berdasarkan perhitungan keserasian belanja, Pemerintah Kalimantan Barat dapat menekan belanja operasi (rutin) dan meningkatkan porsi belanja untuk belanja modal yang lebih mengarah pada pelayanan publik dan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Berdasarkan perhitungan efisiensi belanja, Pemerintah Kalimantan Barat diharapkan dalam merealisasikan komponen-komponen belanja daerah dapat di pertahankan bahkan ditingkatkan lagi agar kedepannya tidak ada kelebihan belanja dalam efisiensi kinerja belanja.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang samadiharapkan dapat menambah metode dengan melakukan wawancara agar mendapatkan informasi yang lebih terperinci sehingga dapat diketahui dengan jelas alasan terjadinya kenaikan dan penurunan pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2016, Manajemen Keuangan Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Abdul, Halim. (2015). Auditing : Dasar – Dasar Audit laporan Keuangan , Edisi Kelima, Yogyakarta : Unti Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arumdari, R.2019. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan. Medan: Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.
- Bastian, I.2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2019. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Raih Opini WDP. Kalimantan Barat: BPK Perwakilan Kalimantan Barat (<https://kalbar.bpk.go.id/pemprov-kalbar-raih-opini-wdp/>) (diakses 11 Juli 2021).
- CALK. 2016. Catatan Atas Laporan Keuangan. Kalimantan Barat: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- CALK. 2017. Catatan Atas Laporan Keuangan. Kalimantan Barat: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- CALK. 2018. Catatan Atas Laporan Keuangan. Kalimantan Barat: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- CALK. 2019. Catatan Atas Laporan Keuangan. Kalimantan Barat: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Enre T. 2020. Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Halim, A. 2007. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2012. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementian Keuangan Direktorat Jendral Keuangan. 2015. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penerbit:<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=365>

Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Keuangan Pendapatan daerah
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-pendapatan-daerah> (diakses 28 Juni 2021)

Kementerian Keuangan Direktorat Jendral.2003. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/17tahun2003uu.htm>(diakses 28 Juni 2021)

Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta

Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.

Muhammad, METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM: Pendekatan Kuantitatif (dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya), Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013, cet.2, h. 97. 2Mudradad Kuncoro, Metode R

Monika, K.2019. Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015-2018. Depok: Politeknik Negeri Jakarta.

Nordiawan. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Pratiwi M,N.2017. Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Istimewa Yogyakarta:UNY.

Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Among Makarti hal 83–112.

Sartika, D.2018.Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara. Medan:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Solihin I.2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.

Suharsimi & Arikunto 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Bina Aksara.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (<http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-33-tahun-2004>, diakses 16 November 2020)

Ulum, I.2009. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG	
	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN	4.636.577.225.666,00	4.494.428.711.520,47	142.148.514.145,53	96,93
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.760.028.743.228,00	1.664.338.991.973,47	95.689.751.254,53	94,56
Pajak Daerah	1.507.139.366.228,00	1.424.303.270.597,00	82.836.095.631,00	94,5
Retribusi Daerah	36.633.330.680,00	33.529.204.985,00	3.104.125.695,00	91,53
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	67.758.908.350,00	70.822.377.986,00	-3.063.469.636,00	104,52
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	148.497.137.970,00	135.684.138.405,47	12.812.999.564,53	91,37
PENDAPATAN TRANSFER	1.917.902.118.000,00	1.860.789.737.696,00	57.112.380.304,00	97,02
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERHIMPANGAN	1.917.902.118.000,00	1.860.789.737.696,00	57.112.380.304,00	97,02
Dana Bagi Hasil Pajak	181.491.962.000,00	167.535.550.706,00	13.956.411.294,00	92,31
Dana Alokasi Umum	1.493.486.253.000,00	1.493.486.253.000,00	0	100
Dana Alokasi Khusus	242.923.903.000,00	199.767.933.990,00	43.155.969.010,00	82,23
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	958.646.364.438,00	969.299.981.851,00	-10.653.617.413,00	101,11
Pendapatan Hibah	5.289.914.438,00	4.773.780.219,00	516.134.219,00	90,24
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	953.356.450.000,00	964.526.201.632,00	-11.169.751.632,00	101,17
JUMLAH PENDAPATAN	4.636.577.225.666,00	4.494.428.711.520,47	142.148.514.145,53	96,93
BELANJA DAERAH	4.635.688.655.160,66	4.320.618.793.066,07	315.069.862.094,59	93,2
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.882.197.751.305,06	2.728.184.377.314,62	154.013.373.990,44	94,66
Belanja Pegawai	701.524.814.980,00	662.457.323.551,00	39.067.491.429,00	94,43
Belanja Hibah	1.035.180.450.000,00	1.043.728.485.549,62	-8.548.035.549,62	100,83
Bantuan Sosial	720.000.000,00	410.000.000,00	310.000.000,00	56,94
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	785.769.392.439,02	681.158.345.765,00	104.611.046.674,02	86,69
Belanja Bantuan Keuangan	354.003.093.886,04	340.430.222.449,00	13.572.871.437,04	96,17
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	0	5.000.000.000,00	0
BELANJA LANGSUNG	1.753.490.903.855,60	1.592.434.415.751,45	161.056.488.104,15	90,82
Belanja Pegawai	112.975.704.735,00	109.290.967.366,00	3.684.737.369,00	96,74
Belanja Barang dan Jasa	1.124.631.092.911,70	1.008.338.791.829,12	116.292.301.082,58	89,66
Belanja Modal	515.884.106.208,90	474.804.656.556,33	41.079.449.652,57	92,04
JUMLAH BELANJA	4.635.688.655.160,66	4.320.618.793.066,07	315.069.862.094,59	93,2
SURPLUS/(DEFISIT)	888.570.505,34	173.809.918.454,40	-172.921.347.949,06	19,560,62
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.111.429.494,66	9.088.795.240,66	22.634.254,00	99,75
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	9.111.429.494,66	9.088.795.240,66	22.634.254,00	99,75
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	9.111.429.494,66	9.088.795.240,66	22.634.254,00	99,75
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0	100
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0	100
JUMLAH PENGELUARAN DAERAH	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0	100
PEMBIAYAAN NETTO	-888.570.505,34	-911.204.759,34	22.634.254,00	102,55
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	0	172.898.713.695,06	-172.898.713.695,06	0

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam rupiah)					
REF	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	PENDAPATAN	5.324.755.788.000,00	5.389.204.121.647,12	101,21	4.494.428.711.520,47
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.757.921.479.000,00	1.945.647.317.495,12	110,68	1.664.338.991.973,47
3	Pendapatan Pajak Daerah	1.509.612.639.000,00	1.660.417.092.948,45	109,99	1.424.303.270.597,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	40.532.326.000,00	39.223.664.905,00	96,77	33.529.204.985,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	71.544.377.000,00	71.545.341.139,00	100,00	70.822.377.986,00
6	Lain-lain PAD yang sah	136.232.137.000,00	174.461.218.502,67	128,06	135.684.138.405,47
7	PENDAPATAN TRANSFER	3.564.602.947.000,00	3.442.225.962.152,00	96,57	2.825.315.939.328,00
8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	3.542.709.557.000,00	3.420.092.372.152,00	96,54	1.860.789.737.696,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	158.654.710.000,00	124.741.075.385,00	78,62	141.806.925.935,00
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	71.324.874.000,00	45.447.764.617,00	63,72	25.728.624.771,00
11	Dana Alokasi Umum	1.720.698.207.000,00	1.720.698.207.000,00	100,00	1.493.486.253.000,00
12	Dana Alokasi Khusus	1.592.031.766.000,00	1.529.205.325.150,00	96,05	199.767.933.990,00
13	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	21.893.390.000,00	22.133.590.000,00	101,10	964.526.201.632,00
14	Dana Penyesuaian	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	964.526.201.632,00
15	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.393.390.000,00	14.633.590.000,00	101,67	
16	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.231.362.000,00	1.330.842.000,00	59,64	4.773.780.219,00
17	Pendapatan Hibah	2.231.362.000,00	1.330.842.000,00	59,64	4.773.780.219,00
18	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
19	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
20	BELANJA	4.709.949.560.510,06	4.555.412.549.375,69	96,72	3.299.030.224.852,07
21	BELANJA OPERASI	3.666.471.131.922,06	3.598.170.727.629,19	98,14	2.824.225.568.295,74
22	Belanja Pegawai	1.233.106.251.769,30	1.239.128.712.064,50	100,49	771.748.290.917,00
23	Belanja Barang	1.461.169.871.652,76	1.388.072.911.190,69	95,00	1.008.338.791.829,12
24	Bunga	-	-	-	-
25	Subsidi	-	-	-	-
26	Hibah	971.475.008.500,00	970.304.104.374,00	99,88	1.043.728.485.549,62
27	Bantuan Sosial	720.000.000,00	665.000.000,00	92,36	410.000.000,00
28	BELANJA MODAL	1.039.990.288.588,00	954.917.377.632,50	91,82	474.804.656.556,33
29	Belanja Tanah	2.872.105.906,00	1.122.053.230,00	39,07	4.670.260.915,00
30	Belanja Peralatan dan Mesin	282.734.745.860,00	248.953.240.295,00	88,05	116.707.762.656,00
31	Belanja Gedung dan Bangunan	167.708.679.764,00	161.185.419.640,50	96,11	70.349.701.028,33
32	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	512.365.277.458,00	468.990.194.891,00	91,53	277.550.051.265,00

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REF	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
33	Belanja Aset Tetap Lainnya	68.820.165.000,00	69.283.946.317,00	100,67	2.547.962.200,00
34	Belanja Aset Lainnya	5.489.314.600,00	5.382.523.259,00	98,05	2.978.918.492,00
35	BELANJA TAK TERDUGA	3.488.140.000,00	2.324.444.114,00	66,64	-
36	Belanja Tak Terduga	3.488.140.000,00	2.324.444.114,00	66,64	-
37	TRANSFER	697.704.941.185,00	704.381.061.493,50	100,96	1.021.588.568.214,00
38	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	695.683.647.300,00	702.673.837.109,50	101,00	681.158.345.765,00
39	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	688.551.892.071,50	695.542.081.881,00	101,02	681.158.345.765,00
40	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
41	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	7.131.755.228,50	7.131.755.228,50	100,00	-
42	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	2.021.293.885,00	1.707.224.384,00	84,46	340.430.222.449,00
43	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	338.830.760.000,00
44	Bantuan Keuangan Lainnya	2.021.293.885,00	1.707.224.384,00	84,46	1.599.462.449,00
45	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	5.407.654.501.695,06	5.259.793.610.869,19	97,27	4.320.618.793.066,07
46	SURPLUS/DEFISIT	(82.898.713.695,06)	129.410.510.777,93	(156,11)	173.809.918.454,40
47	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	172.898.713.695,06	172.898.713.695,06	100,00	9.088.795.240,66
48	Penggunaan SILPA	172.898.713.695,06	172.898.713.695,06	100,00	9.088.795.240,66
49	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
50	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
51	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
52	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
53	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
54	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
55	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-
57	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00
58	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
59	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
60	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
61	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
64	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00
65	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REF	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
66	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-		-
67	PEMBIAYAAN NETTO	82.898.713.695,06	82.898.713.695,06	100,00	(911.204.759,34)
68	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	212.309.224.472,99		172.898.713.695,06



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (dalam rupiah)					
NO	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.791.581.091.087,00	2.194.867.823.990,63	122,51	1.945.647.317.495,12
3	Pendapatan Pajak Daerah	1.519.724.639.000,00	1.919.257.811.014,00	126,29	1.660.417.092.948,45
4	Pendapatan Retribusi Daerah	39.330.768.500,00	40.482.187.399,00	102,93	39.223.664.905,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	74.923.253.587,00	79.727.132.076,18	106,41	71.545.341.139,00
6	Lain-lain PAD yang sah	157.602.430.000,00	155.400.693.501,45	98,60	174.461.218.502,67
7	PENDAPATAN TRANSFER	3.525.443.054.040,00	3.462.831.829.650,00	98,22	3.442.225.962.152,00
8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	3.507.095.169.000,00	3.444.983.949.610,00	98,23	3.420.092.372.152,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	158.472.552.000,00	147.536.279.080,00	93,10	124.741.075.385,00
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	69.514.130.000,00	64.690.232.937,00	93,06	45.447.764.617,00
11	Dana Alokasi Umum	1.724.402.496.000,00	1.724.402.496.000,00	100,00	1.720.698.207.000,00
12	Dana Alokasi Khusus	1.554.705.991.000,00	1.508.354.941.593,00	97,02	1.529.205.325.150,00
13	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	18.347.885.040,00	17.847.880.040,00	97,27	22.133.590.000,00
14	Dana Penyesuaian	7.250.000.000,00	7.250.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
15	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.097.885.040,00	10.597.880.040,00	95,49	14.633.590.000,00
16	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.231.362.000,00	2.358.960.400,00	105,72	1.330.842.000,00
17	Pendapatan Hibah	2.231.362.000,00	2.358.960.400,00	105,72	1.330.842.000,00
18	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
19	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
20	JUMLAH PENDAPATAN	5.319.255.507.127,00	5.660.058.614.040,63	106,41	5.389.204.121.647,12
21	BELANJA				
22	BELANJA OPERASI	3.933.617.432.411,00	3.702.508.227.349,85	98,14	3.598.170.727.629,19
23	Belanja Pegawai	1.304.713.876.771,71	1.303.875.294.256,75	99,94	1.239.128.712.064,50
24	Belanja Barang	997.157.252.955,29	881.206.324.583,63	88,37	952.511.380.820,69
25	Bunga	-	-	-	-
26	Subsidi	-	-	-	-
27	Hibah	1.630.346.302.684,00	1.516.041.608.509,47	92,99	1.405.865.634.744,00
28	Bantuan Sosial	1.400.000.000,00	1.385.000.000,00	98,93	665.000.000,00
29	BELANJA MODAL	754.633.468.096,00	676.487.480.501,70	89,64	954.917.377.632,50
30	Belanja Tanah	3.293.993.880,00	2.054.552.825,00	62,37	1.122.053.230,00
31	Belanja Peralatan dan Mesin	180.664.816.066,00	152.468.875.792,70	84,39	248.953.240.295,00
32	Belanja Gedung dan Bangunan	258.830.580.850,00	227.842.994.496,00	88,03	161.185.419.640,50
33	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	276.403.519.400,00	258.901.210.788,00	93,67	468.990.194.891,00
34	Belanja Aset Tetap Lainnya	34.628.350.000,00	34.437.635.200,00	99,45	69.283.946.317,00
35	Belanja Aset Lainnya	812.207.900,00	782.211.400,00	96,31	5.382.523.259,00
36	BELANJA TAK TERDUGA	1.652.310.000,00	1.001.131.300,00	60,59	2.324.444.114,00
37	Belanja Tak Terduga	1.652.310.000,00	1.001.131.300,00	60,59	2.324.444.114,00

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
38	TRANSFER	753.482.296.620,00	961.407.995.045,00	127,60	704.381.061.493,50
39	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	750.502.977.420,00	958.430.675.845,00	127,71	702.673.837.109,50
40	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	750.502.977.420,00	958.430.675.845,00	127,71	695.542.081.881,00
41	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota				-
42	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota				7.131.755.228,50
43	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	2.979.319.200,00	2.977.319.200,00	99,93	1.707.224.384,00
44	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0	-		-
45	Bantuan Keuangan Lainnya	2.979.319.200,00	2.977.319.200,00	99,93	1.707.224.384,00
46	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	5.443.385.507.127,00	5.341.404.834.196,55	98,13	5.259.793.610.869,19
47	SURPLUS/DEFISIT	(124.130.000.000,00)	318.653.779.844,08	(256,71)	129.410.510.777,93
48	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	290.000.000.000,00	212.122.428.187,69	73,15	172.898.713.695,06
49	Penggunaan SILPA	290.000.000.000,00	212.122.428.187,69	73,15	172.898.713.695,06
50	Pencairan Dana Cadangan				-
51	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				-
52	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				-
53	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya				-
54	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank				-
55	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				-
56	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				-
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya				-
58	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	165.870.000.000,00	165.870.000.000,00	100,00	90.000.000.000,00
59	Pembentukan Dana Cadangan				-
60	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				-
61	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya				-
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank				-
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				-
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				-
65	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	165.870.000.000,00	165.870.000.000,00	100,00	90.000.000.000,00
66	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara				-
67	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya				-
68	PEMBIAYAAN NETTO	124.130.000.000,00	46.252.428.187,69	37,26	82.898.713.695,06
69	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		364.906.208.031,77		212.309.224.472,99

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (dalam rupiah)					
NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
5.1.1	PENDAPATAN	5.899.219.616.674,00	5.939.753.156.803,85	100,69	5.660.058.614.040,63
5.1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.178.980.318.674,00	2.301.306.937.991,85	105,61	2.194.867.823.990,63
5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.842.872.680.300,00	1.959.341.747.012,00	106,32	1.919.257.811.014,00
5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	47.678.024.000,00	45.882.806.261,00	96,23	40.482.187.399,00
5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92.200.665.383,00	92.440.352.490,51	100,26	79.727.132.076,18
5.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	196.228.948.991,00	203.642.032.228,34	103,78	155.400.693.501,45
5.1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.716.691.298.000,00	3.635.394.245.312,00	97,81	3.462.831.829.650,00
5.1.1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	3.701.419.839.000,00	3.620.122.786.312,00	97,80	3.444.983.949.610,00
5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	157.174.363.000,00	108.566.864.034,00	69,07	147.536.279.080,00
5.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	75.346.648.000,00	69.156.412.335,00	91,78	64.690.232.937,00
5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.756.069.684.000,00	1.756.069.684.000,00	100,00	1.724.402.496.000,00
5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	1.712.829.144.000,00	1.686.329.825.943,00	98,45	1.508.354.941.593,00
5.1.1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	15.271.459.000,00	15.271.459.000,00	100,00	17.847.880.040,00
5.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian	15.271.459.000,00	15.271.459.000,00	100,00	7.250.000.000,00
5.1.1.2.3	BANTUAN KEUANGAN	-	-	0,00	10.597.880.040,00
5.1.1.2.3.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	0,00	10.597.880.040,00
5.1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3.548.000.000,00	3.051.973.500,00	86,02	2.358.960.400,00
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	3.548.000.000,00	3.051.973.500,00	86,02	2.358.960.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.899.219.616.674,00	5.939.753.156.803,85	100,69	5.660.058.614.040,63
5.1.2	BELANJA	6.214.125.824.705,77	5.677.397.310.139,45	91,36	5.341.404.834.196,55
5.1.2.1	BELANJA OPERASI	4.074.673.399.727,44	3.813.653.832.437,24	93,59	3.702.508.227.349,85
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	1.471.046.054.351,26	1.368.118.248.743,00	93,00	1.303.875.294.256,75
5.1.2.1.2	Belanja Barang	1.104.285.182.758,68	941.373.676.283,24	85,25	881.206.324.583,63
5.1.2.1.3	Bunga	0,00	0,00	0,00	-
5.1.2.1.4	Subsidi	0,00	0,00	0,00	-
5.1.2.1.5	Hibah	1.489.442.162.617,50	1.498.504.307.411,00	100,61	1.516.041.608.509,47
5.1.2.1.6	Bantuan Sosial	9.900.000.000,00	5.657.600.000,00	57,15	1.385.000.000,00
5.1.2.1.7	BELANJA MODAL	1.040.727.102.824,33	871.609.747.356,21	83,75	676.487.480.501,70
5.1.2.1.7.1	Belanja Tanah	4.811.051.600,00	2.180.866.843,00	45,33	2.054.552.825,00
5.1.2.1.7.2	Belanja Peralatan dan Mesin	281.770.385.442,40	256.784.963.010,00	91,13	152.468.875.792,70
5.1.2.1.7.3	Belanja Gedung dan Bangunan	427.145.351.623,93	324.985.255.157,37	76,08	227.842.994.496,00
5.1.2.1.7.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	315.372.432.042,00	277.019.755.905,84	87,84	258.901.210.788,00

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
5.1.2.1.7.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.869.376.000,00	2.225.100.390,00	77,55	34.437.635.200,00
5.1.2.1.7.6	Belanja Aset Lainnya	8.758.506.116,00	8.413.806.050,00	96,06	782.211.400,00
5.1.2.1.8	BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000,00	21.744.000,00	0,43	1.001.131.300,00
5.1.2.1.8.1	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	21.744.000,00	0,43	1.001.131.300,00
5.1.3	TRANSFER	1.093.725.322.154,00	992.111.986.346,00	90,71	961.407.995.045,00
5.1.3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	1.070.058.428.570,00	969.916.744.046,00	90,64	958.430.675.845,00
5.1.3.1.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.070.058.428.570,00	969.916.744.046,00	90,64	958.430.675.845,00
5.1.3.1.2	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	23.666.893.584,00	22.195.242.300,00	93,78	2.977.319.200,00
5.1.3.1.2.1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	20.613.786.784,00	19.160.582.400,00	92,95	-
5.1.3.1.2.2	Bantuan Keuangan Lainnya	3.053.106.800,00	3.034.659.900,00	99,40	2.977.319.200,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	6.214.125.824.705,77	5.677.397.310.139,45	91,36	5.341.404.834.196,55
	SURPLUS/DEFISIT	(314.906.208.031,77)	262.355.846.664,40	-83,31	318.653.779.844,08
5.1.4	PEMBIAYAAN	314.906.208.031,77	314.906.293.031,77	100,00	46.252.428.187,69
5.1.4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	364.906.208.031,77	364.906.293.031,77	100,00	212.122.428.187,69
5.1.4.1.1	Penggunaan SILPA	364.906.208.031,77	364.906.293.031,77	100,00	212.122.428.187,69
5.1.4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	165.870.000.000,00
5.1.4.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	165.870.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	314.906.208.031,77	314.906.293.031,77	100,00	46.252.428.187,69
5.1.5	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	577.262.139.696,17	0,00	364.906.208.031,77

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 PASUTARMI, SH, M.Hum